

Keberpihakan Fiji kepada Tiongkok Sebagai Respon atas Pembekuan Keanggotaan Fiji dalam *Pacific Islands Forum* (2009-2014)

Fauzi Firmansyah Prakoso

071411233007

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Kudeta militer di Fiji pada tahun 2006 membuat Australia sebagai negara yang berpengaruh cukup besar di kawasan menekan agar Fiji segera mengakhiri rezim militernya dan melaksanakan pemilu yang demokratis. Namun, Fiji justru memutuskan untuk tidak melakukannya terlebih dahulu. Atas keputusan tersebut, Australia memutuskan untuk membekukan keanggotaan Fiji dalam *Pacific Islands Forum* (PIF). Hal ini berarti bahwa Fiji tidak lagi mendapatkan bantuan luar negeri dari Australia maupun PIF. Meski begitu, Fiji tetap mempertahankan keputusannya dan justru membuat kebijakan yang mampu tetap memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah keputusan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Tiongkok sendiri pada dasarnya tidak memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan Pasifik Selatan. Meski begitu Fiji tetap yakin dengan hubungannya dengan Tiongkok bahwa Tiongkok menggantikan Australia sebagai negara yang memberikan bantuan luar negeri bagi Fiji. Keberlangsungan hubungan kedua negara dapat dilihat dengan pendekatan aliansi yang khusus dilakukan oleh *middle power*, yaitu *bonding*. Aliansi ini sendiri kemudian dapat dibuat lebih spesifik, yaitu sebagai suatu aliansi yang bernilai *strategic partnership*. Berawal dari hubungan tersebut, Fiji berhasil memunculkan perasaan *independence* dan *confidence* dari dalam diri Fiji. Hal ini mampu membuat Fiji meningkatkan perannya di kawasan. Bentuk peran baru yang dimiliki oleh Fiji ini dijalankan melalui kritik yang diberikan kepada PIF serta peningkatan peran melalui *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Islands Development Forum* (PIDF).

Kata Kunci: Fiji, Tiongkok, *Bonding*, *Strategic Partnership*, *Independence*, *Confidence*.

The military coup in Fiji in 2006 made Australia who was a major influential country in the region pressing Fiji to immediately end its military regime and conduct democratic elections. However, Fiji just decided not to do it. On the decision, Australia decided to suspend Fiji's membership in the Pacific Islands Forum (PIF). This means that Fiji is no longer getting foreign aid from Australia or PIF. Nevertheless, Fiji has maintained its decision and has made a policy that is capable of meeting its needs, one of which is the decision to forge closer ties with China. China basically has no significant influence in the South Pacific region. Even so Fiji remains convinced with its relationship with China that China can replaces Australia as a country providing foreign aid to Fiji. The sustainability of the relations between them can be seen with an alliance conducted by middle power, namely *bonding*. The alliance itself can then be made more specific, as an alliance that's worth the *strategic partnership*. Start from the relationship, Fiji managed to bring the feeling of *independence* and *confidence* from within Fiji. This is able to make Fiji improve its role in the region. This new role form that is owned by Fijian is run through criticism given to PIF as well as increased roles through the *Melanesian Spearhead Group* (MSG) and *Pacific Islands Development Forum* (PIDF).

Key Word: Fiji, Tiongkok, *Bonding*, *Strategic Partnership*, *Independence*, *Confidence*.

Sebagai negara anggota *Pacific Islands Forum* (PIF), Fiji ikut menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis seperti apa yang diterapkan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Hal ini dikarenakan demokrasi menjadi salah satu unsur penting dalam keanggotaan dalam PIF (Peebles 2005, 66). Namun, Fiji masih belum mampu memenuhi unsur tersebut, dimana perpolitikan domestik Fiji cenderung kurang stabil. Hal ini dapat terlihat pada kudeta yang berlangsung di Fiji, yaitu pada tahun 1987 yang menandakan kudeta pertama dalam sepanjang sejarah Fiji. Kudeta yang berikutnya kemudian berlangsung kembali pada tahun 2000. Roderic Alley (2001, 228) menjelaskan bahwa faktor kesenjangan etnis menjadi faktor utama yang memicu kedua kudeta tersebut, dimana kehadiran masyarakat Fiji berketurunan India beberapa kali dinilai menjadi ancaman bagi masyarakat asli Fiji. Hal ini terlihat pada kudeta pada tahun 1987 dan 2000 yang berlangsung akibat dominasi masyarakat Fiji berketurunan India terhadap masyarakat Fiji asli (Thomas 1990, 131). Kudeta ini kemudian berlangsung kembali pada tahun 2006. Kudeta yang dijalankan oleh Frank Bainimarama ini dinilai mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh pemerintahan Fiji selama ini, yaitu masalah kesenjangan etnis (Thomas 1990, 132). Bahkan, Bainimarama bertujuan untuk mengakhiri segala kudeta yang telah berlangsung di Fiji.

Meski memiliki tujuan untuk mengakhiri segala kudeta yang telah berlangsung di Fiji, pada nyatanya keputusan Bainimarama untuk melakukan kudeta pada tahun 2006 justru memberikan permasalahan baru bagi Fiji. Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Bainimarama, yaitu pemerintahan rezim militer dinilai kurang sesuai dengan nilai yang diterapkan di kawasan Pasifik Selatan. Atas hal tersebut, Australia sebagai negara yang memiliki pengaruh terbesar di kawasan mendesak agar Fiji segera melakukan pemilu yang demokratis, namun Fiji menolak untuk melaksanakannya hingga tahun 2014 (Hasenkamp 2014, 12). Rukma dan Pakpahan (2015, 1845) melalui tulisannya menambahkan bahwa Australia dibantu oleh Selandia Baru mencoba untuk terus melakukan intervensi agar Fiji segera melakukan pemilu yang demokratis. Hal ini dilakukan agar keberlangsungan rezim militer di Fiji tidak diikuti oleh negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Baik Australia maupun Selandia Baru tidak segan untuk melakukan intervensi sebagai bentuk penekanan terhadap Fiji. Intervensi ini berupa sanksi-sanksi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, wisata, hingga olahraga (Gaglioti 2009). Puncak dari tekanan ini adalah tekanan yang diberikan oleh Australia melalui PIF. PIF sepakat memutuskan bahwa apabila Fiji tidak mampu menyelenggarakan pemilu yang demokratis hingga 1 Mei 2009, maka keanggotaan Fiji dalam PIF akan dibekukan (Gaglioti 2009). Meski begitu, Frank Bainimarama tetap memegang prinsipnya untuk tetap tidak menyelenggarakan segala pemilu hingga delapan tahun kepemimpinannya, atau lebih tepatnya hingga 2014. Keputusan Bainimarama membuat keanggotaan Fiji resmi dibekukan pada tahun 2009.

Sanksi pembekuan keanggotaan dalam PIF ini merupakan periode baru dalam sejarah Fiji. Akibat pembekuan keanggotaan ini, Fiji harus kehilangan hubungannya dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan lainnya, khususnya hubungan dengan Australia dan Selandia Baru yang merupakan negara pendonor utama dalam hal pemberi bantuan luar negeri bagi Fiji. Terlebih lagi, pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF bukanlah satu-satunya sanksi yang diterima oleh Fiji. Selain itu, keanggotaan Fiji dalam *Commonwealth Minister of Action Group* (CMAG) juga dibekukan. Tanpa adanya keanggotaan dalam PIF maupun CMAG, Fiji tentu tidak lagi mendapatkan bantuan luar negeri dari para pendonor utamanya. Akibat pembekuan tersebut, seluruh tenaga kerja Fiji tidak lagi mendapatkan Fiji visa pekerjaan di Australia dan Selandia Baru. Selain itu, latihan bersama antara tentara Fiji dengan tentara Australia maupun Selandia Baru juga dibatalkan seiring dengan sanksi yang diterima oleh Fiji (Lal 2009, 84). Rukma dan Pakpahan (2015, 1846) juga menambahkan bahwa sektor pariwisata Fiji terancam mengalami penurunan setelah Australia mengeluarkan larangan bagi penduduknya untuk mendatangi Fiji. Tidak hanya itu, aset-aset yang dimiliki oleh warga Fiji yang menetap di Australia juga dibekukan seiring dengan sanksi yang diterima oleh Fiji. Tekanan yang dilakukan oleh Australia tidak hanya terbatas dalam lingkup kawasan. Australia bahkan berusaha mencegah agar Fiji tidak dapat ikut serta dalam misi perdamaian

yang dijalankan oleh PBB (Rukma dan Pakpahan 2015, 1846). Segala tekanan ini dilakukan agar Fiji segera melakukan pemilu yang demokratis.

Meskipun telah mendapatkan tekanan yang cukup banyak, hal ini tidak semerta-merta membuat Frank Bainimarama mengakhiri rezim militernya. Agar Fiji tetap mampu bertahan, Bainimarama mencoba untuk menguatkan posisi Fiji di kawasan Pasifik Selatan, dimana pada dasarnya Fiji juga memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Australia maupun Selandia Baru. Pada dasarnya, beberapa negara kecil di kawasan Pasifik Selatan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada Fiji dibandingkan kepada Australia maupun Selandia Baru. Negara seperti Tuvalu menjadikan Fiji sebagai pusat pendidikan bagi penduduk Tuvalu (Hasenkamp 2014, 19). Selain itu, Baiq Wardhani et al. (2018, 39) juga menyampaikan bahwa Suva yang merupakan ibu kota Fiji juga terdapat University of the South Pacific (USP), dimana USP merupakan pusat pendidikan tinggi bagi mayoritas penduduk Pasifik Selatan. Selain itu, Fiji juga seakan ingin semakin menguatkan posisinya di kawasan melalui pembentukan organisasi regional yang baru, yaitu *Pacific Islands Development Forum* (PIDF) (Mawi 2015, 102-103). Melalui kepemimpinannya di PIDF, Fiji mencoba untuk memenuhi kebutuhan negara-negara kecil di sekitarnya. Dengan adanya peran ini, Bainimarama mencoba untuk menunjukkan bahwa Fiji masih memiliki pengaruh yang kuat di kawasan.

Walaupun memiliki beberapa upaya menguatkan posisinya di kawasan, tidak dapat diabaikan bahwa Fiji tetap membutuhkan bantuan luar negeri dari negara yang lebih besar setelah Australia dan Selandia Baru tidak lagi memberikan bantuan luar negeri kepada Fiji. Hal ini dikarenakan Fiji masih terhitung sebagai suatu *small states* dalam lingkup ukuran dan kemampuannya. Melihat kondisi ini, Tiongkok mencoba untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Australia dan Selandia Baru. Tiongkok pada dasarnya memiliki kepentingan yang terbatas di kawasan Pasifik Selatan karena Amerika Serikat memiliki pengaruh yang cukup kuat pada masing-masing negara di kawasan Pasifik Selatan. Bahkan, Jian Zhang (2015, 44) menganggap kawasan Pasifik Selatan sebagai “an American Lake”. Meski begitu, hal ini tidak membuat Tiongkok mengurangi keinginannya untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini, dimana kesempatan ini datang melalui Fiji. Seiring dengan keinginan Tiongkok, Fiji juga menerima kehadiran Tiongkok dan mencoba untuk meningkatkan hubungan baiknya dengan Tiongkok. Hal ini kemudian berdampak kepada peningkatan bantuan yang cukup drastis oleh Tiongkok kepada Fiji, dimana pada tahun 2006 jumlah bantuannya hanya sebesar 36 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 251 juta dolar Amerika Serikat. Peningkatan ini juga diiringi dengan pembentukan kebijakan “Look North” yang dijalankan oleh pemerintah Fiji, dimana Fiji memang ingin menguatkan hubungan bilateralnya dengan Tiongkok atas respon baik yang diberikan Tiongkok kepada Fiji (Gaglioti 2009; Komai 2015, 113).

***Strategic Partnership* sebagai Nilai Positif dalam Pembentukan Aliansi *Middle Power* di Kawasan**

Dinamika perubahan kekuatan, baik dalam lingkup global maupun regional terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Suatu unipolaritas yang terdapat dalam suatu sistem internasional tidak akan selamanya bertahan karena akan muncul kekuatan-kekuatan baru pada suatu saat. Kondisi ini kemudian mengarah kepada kemunculan kekuatan-kekuatan baru yang disebut pula dengan konsep *rising regional power*. Pinar Tank (2012, 2) menjelaskan bahwa *rising regional power* merupakan suatu perubahan dinamika kekuatan yang berlangsung dalam sistem internasional. Suatu negara digolongkan sebagai *rising regional power* ketika negara tersebut mengalami peningkatan dalam hal kekuatan, baik *hard power* maupun *soft power*. Terkait hal ini, Samuel Huntington (1999 dalam Nolte 2007, 12) menambahkan bahwa pemahaman terkait *rising regional power* kemudian berkembang sehingga berkaitan dengan *middle power in the region* atau juga dikenal dengan *secondary regional power*.

Akibat keterkaitan antara kedua konsep tersebut, maka karakteristik yang dimiliki oleh *rising regional power* tentu tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh suatu *middle power* yang spesifik di suatu kawasan tertentu. Karakteristik tersebut adalah menekankan pada pendekatan multilateral dan pendekatan kooperatif. Selain itu, *soft power* menjadi kekuatan yang lebih dominan bagi *middle power* dibandingkan *hard power*. Terkait karakteristik yang dimiliki suatu *rising regional power*, Matthew D. Stephen (2012, 293) menyampaikan bahwa terdapat tiga perspektif yang memandang keberadaan suatu *rising regional power*. Ketiga perspektif tersebut adalah *rising regional power* cenderung mencoba untuk mengimbangi kekuatan maupun pengaruh dari *super power* yang sudah ada, *rising regional power* juga mencoba untuk mengganggu keberlangsungan suatu institusi internasional, serta *rising regional power* cenderung terkooptasi ke dalam suatu institusi internasional. Dalam kaitan penelitian ini, perspektif kedua, yaitu mengganggu keberlangsungan suatu institusi internasional cenderung lebih sesuai apabila diimplementasikan. Terlepas dari perspektif tersebut, suatu *rising regional power* juga memiliki karakteristik lain yang dapat menunjang keberlangsungannya. Karakteristik tersebut adalah membentuk koalisi multilateral atau aliansi sebagai media untuk memenuhi kepentingannya (Fonseca et al. 2016, 53).

Aliansi mampu menjadi langkah yang sesuai bagi suatu negara untuk memenuhi kepentingannya, terlebih apabila negara tersebut memiliki kekuatan yang masih terbatas, seperti negara-negara yang tergolong *rising regional power* atau suatu *middle power* di kawasan. Berdasarkan tulisan milik Snyder (1990 dalam Niou dan Ordeshook 1994, 168), aliansi merupakan suatu asosiasi yang terbentuk antar negara dan bentuknya dapat berbentuk formal dan non-formal. Selain itu, pembentukan aliansi dapat meliputi berbagai aspek tidak selalu berkaitan dengan aspek militer, seperti aspek ekonomi, sosial, maupun aspek-aspek lainnya. Pembentukan suatu aliansi ini juga tidak selalu dimulai oleh negara yang lebih besar kekuatannya. Pada dasarnya, pihak manapun berhak dan mampu untuk memulai inisiatif untuk membentuk aliansi. Dilihat dari sudut pandang negara yang lebih kecil kekuatannya, mereka membentuk suatu aliansi ketika mereka membutuhkan perlindungan atau bantuan dari negara yang lebih besar. Di lain pihak, negara yang lebih besar juga tidak menutup kemungkinan untuk membentuk suatu aliansi ketika mereka memiliki keinginan untuk menandingi atau bahkan melawan negara yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup kuat sehingga menjadi ancaman bagi negara tersebut (Dwivedi 2012, 224).

Apabila dikaitkan dengan aktor *rising regional power* atau *middle power* di kawasan, pola aliansi yang dilakukan oleh negara tersebut tentu berbeda dengan negara-negara yang berada pada kelompok negara *super power* maupun negara *small power*. Chong Ja Ian (2003, 1) melalui tulisannya mencoba untuk menjelaskan bagaimana negara-negara *second tier* atau yang dimaksud juga dengan negara *middle power* memainkan perannya dalam hal pembentukan suatu aliansi. Dalam implementasinya, terdapat empat bentuk pilihan strategi aliansi yang dapat dilakukan oleh suatu negara *middle power*. Pilihan tersebut antara lain adalah *buffering*, *bonding*, *binding*, serta *beleaguering*. Apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pilihan strategi *bonding* menjadi pilihan strategi yang lebih sesuai dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi *bonding* merupakan bentuk strategi aliansi negara *second tier* ketika berada pada kondisi yang spesifik. Kondisi yang dimaksud adalah ketika suatu negara memiliki perbandingan kekuatan yang berbeda cukup jauh dengan *super power* yang berada pada suatu sistem internasional atau suatu kawasan yang spesifik. Kondisi lainnya adalah tingkat integrasi suatu negara yang sedang mengalami penurunan (Ian 2003, 10). Terlepas dari kondisi yang mendorong terbentuknya bentuk aliansi *bonding*, aliansi *bonding* memiliki definisinya tersendiri. Aliansi *bonding* merupakan bentuk strategi negara *middle power* yang memberikan suatu hal, baik hal material maupun jasa yang dibutuhkan oleh rekan aliansinya. Melalui aliansi yang terbentuk diharapkan mampu mewujudkan dukungan kepada negara *middle power* yang membutuhkan dukungan terhadap kepentingannya (Ian 2003, 11).

Berkaitan dengan implementasi suatu aliansi, keberlangsungan dari suatu aliansi tersebut dapat menjadi lebih dispesifikkan sesuai dengan tujuan dan latar belakang dibentuknya suatu aliansi. Bentuk spesifikasi ini dapat berupa *strategic partnership*. Lucyna Czazhowska (2013, 37) melalui tulisannya menyampaikan bahwa *strategic partnership* merupakan suatu bentuk kerjasama atau aliansi yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan atau kepentingan strategis antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian, implementasi dari *strategic partnership* ini memiliki sifat jangka waktu yang berorientasi kepada jangka panjang, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ieva Gajauskaite (2013, 191) menambahkan bahwa suatu *strategic partnership* dapat mencerminkan keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk membentuk kerjasama yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan secara tidak langsung juga dapat memperkuat pengaruh suatu pihak di kawasan tertentu. Aspek yang membuat *strategic partnership* menjadi berbeda daripada suatu bentuk aliansi yang biasa adalah *strategic partnership* bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bersama dan berupaya mengurangi biaya maupun tenaga yang dikeluarkan, tidak lagi hanya sebatas membentuk aliansi untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak. Tentu hal ini akan mampu semakin menguatkan hubungan aliansi antar pihak karena pembentukan aliansi yang berdasar *strategic partnership* mampu membentuk perasaan saling percaya dan saling mendukung.

Dinamika Interaksi Fiji-Tiongkok: Sebelum dan Setelah Kudeta Fiji 2006

Hubungan yang terbentuk antara Fiji dengan Tiongkok pada dasarnya bukanlah suatu hubungan yang baru terbentuk pasca terjadinya pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF. Bahkan, perlu diketahui bahwa Fiji merupakan negara dari kawasan Pasifik Selatan yang pertama kali menjalin hubungan dengan Tiongkok. Jian Yang (2009, 207) melalui tulisannya menjelaskan bahwa Fiji mulai membentuk hubungan diplomatis dengan Tiongkok pada 5 November 1975. Setelah terbentuk, Tiongkok beberapa kali memberikan bantuan luar negeri kepada Fiji namun masih kurang mendapatkan perhatian internasional. Oleh karena itu, Perdana Menteri Fiji, Ratu Sir Kamisese Mara melakukan kunjungan resmi yang pertama ke Tiongkok pada tahun 1978. Seiring dengan kunjungan tersebut, Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Chen Muhua juga melakukan kunjungan ke Fiji pada tahun 1979 (Guixia 2015, 1). Kunjungan ini seakan menjadi bukti nyata adanya hubungan antara Fiji dengan Tiongkok. Pada saat itu, kedua negara menjalin hubungan kerjasama atas dasar keinginan untuk saling membantu antara sesama negara dunia ketiga. Sebagai bentuk nyata kerjasama kedua negara, Fiji dan Tiongkok membentuk *Memorandum on Paddy Field Project* pada 29 Juli 1983 yang menjadikan proyek bersama yang pertama bagi kedua negara.

Berkaitan dengan hubungan yang terbentuk antara kedua negara, beberapa bentuk kerjasama telah terbentuk untuk tujuan memenuhi kepentingan kedua pihak. Dalam bidang ekonomi, Tiongkok pada tahun 1978 membuka pameran dagang di Suva untuk memperkenalkan perekonomian Tiongkok kepada masyarakat Fiji. Kemudian, Tiongkok juga mengirim tim sepak bola Tiongkok ke Fiji pada tahun 1975 dalam rangka pertukaran budaya (Yang 2009, 207). Selain itu, Tiongkok juga mengirimkan ahli teknologi agrikulturnya ke Fiji untuk mengajarkan teknik menanam beras pada tahun 1986. Tiongkok juga memberikan *interest-free loans* kepada pemerintahan Fiji untuk membiayai pembangunan stasiun pembangkit listrik tenaga air Bukuya di Viti Levu dan Wainiqueu di Vanua Levu (Guixia 2015, 2). Dalam segi politik Jian Yang (2011, 306) melalui tulisannya menyampaikan bahwa Tiongkok telah memberikan dukungan politik kepada Fiji sejak awal. Pada kudeta 1987 di Fiji, Tiongkok cenderung bersifat netral tanpa memunjukkan Fiji seperti yang dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru.

Dinamika hubungan antara Fiji dengan Tiongkok berlanjut hingga memasuki periode pasca kudeta militer Fiji pada tahun 2006. Disaat negara-negara lain semakin memojokkan Fiji, Tiongkok justru mengambil langkah yang berbeda. Tiongkok mencoba mengambil kesempatan untuk mengisi kekosongan posisi pendonor bantuan luar negeri bagi Fiji yang sebelumnya dikuasai oleh pengaruh Australia. Fiji sendiri tidak keberatan untuk menerima Tiongkok sebagai pemberi bantuan luar negeri bagi Fiji mengingat Tiongkok merupakan salah

satu “sahabat lama” bagi Fiji (Guixia 2015, 3). Fiji bahkan berani untuk tidak lagi menghiraukan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh Australia maupun Selandia Baru dan lebih memilih untuk lebih dekat kepada Tiongkok. Melihat respon yang diberikan oleh Fiji, Tiongkok juga tidak segan untuk meningkatkan jumlah bantuan luar negeri yang diberikan kepada Fiji. Duta Besar Tiongkok untuk Fiji pada saat itu, Cai Jinbiao bahkan mendeklarasikan bahwa Fiji berhak untuk mendapatkan bantuan luar negeri dari Tiongkok, meskipun telah berlangsung kudeta militer yang digerakkan Frank Bainimarama (Guixia 2015, 3).

Dari pihak Fiji, pemerintahan Fiji juga mencoba menunjukkan bahwa Fiji serius ingin menguatkan hubungannya dengan Tiongkok serta mencoba untuk terlepas dari pengaruh Australia dan Selandia Baru. Berdasarkan tulisan Makareta Komai (2015, 113), Menteri Luar Negeri Fiji pada saat itu, Ratu Inoke Kubuabola mengatakan bahwa “Fiji no longer looks to Australia and New Zealand but to the world”. Pernyataan ini sendiri kemudian mengarah kepada pembentukan kebijakan yang merefleksikan keinginan tersebut, yaitu *Look North Policy*. Kebijakan ini membuat Fiji tidak lagi mengutamakan hubungannya dengan Australia maupun Selandia Baru, melainkan negara-negara yang berada di bagian utara, termasuk Tiongkok (Komai 2015, 113). Adanya peningkatan hubungan ini juga berdampak kepada peningkatan pengaruh Tiongkok di Fiji. Hal ini mampu menjadikan Tiongkok sebagai pendonor bantuan luar negeri tertinggi di Fiji karena sejak 2006, Tiongkok terus meningkatkan bantuan luar negerinya kepada Fiji sehingga mengalahkan Australia. Apabila ditotal, pada tahun 2006 hingga 2014, bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok mampu mencapai angka 359,8 juta USD, sedangkan Australia hanya mampu mencapai angka 303,14 juta USD (Lowy Institute fo International Policy 2015).

Keberhasilan peningkatan hubungan antara Fiji dengan Tiongkok tidak akan berhasil apabila tidak ada perasaan saling percaya antar kedua belah pihak. Adanya perasaan saling percaya ini tidak lain berawal dari penerapan prinsip *non-interference* yang diterapkan oleh Tiongkok. Prinsip *non-interference* sendiri merupakan bentuk tidak campur Tiongkok terhadap segala permasalahan domestik yang dialami oleh negara lain, khususnya negara yang berhubungan dengan Tiongkok. Adanya kudeta yang berlangsung di Fiji tidak terlalu dipermasalahkan oleh Tiongkok karena Tiongkok menilai hal tersebut merupakan masalah internal Fiji yang tidak perlu membuat Tiongkok ikut terlibat. Seorang diplomat dari Tiongkok bahkan menyatakan bahwa “There is no ‘economic sanction’ in our diplomatic vocabulary” (Guixia 2015, 3; Yang 2011, 310). Tentu respon semacam ini menjadi respon yang diharapkan oleh pihak Fiji. Hal ini pula yang menjadi alasan bagi Fiji untuk memilih semakin mendekati diri kepada Tiongkok dibandingkan dengan Australia maupun Selandia Baru. Frank Bainimarama bahkan mengatakan “The Chinese authorities are very sympathetic and understand what’s happening here – the fact that we need to do things in our own way” (Komai 2015, 113). Penerapan prinsip *non-interference* sendiri pada dasarnya merupakan strategi jangka panjang dari Tiongkok dalam menjalin hubungan dengan negara lain, dimana terbentuknya *mutual respect* akan mampu berdampak pada hubungan yang mampu bertahan lama.

Keuntungan Fiji serta Tiongkok sebagai Bentuk Kelanjutan dari Hubungan Fiji-Tiongkok

Keberlangsungan hubungan aliansi Fiji dengan Tiongkok dapat dikatakan tidak sebatas hubungan yang biasa. Xi Jinping melalui kunjungannya ke Fiji pada tahun 2014 menyatakan bahwa hubungan yang dibentuk diantara kedua negara bersifat *strategic partnership* yang didasari atas perasaan saling menghormati dan berorientasi kepada pengembangan kebutuhan bersama (Kun 2015). Terlebih lagi, Chinese Embassy (2017) juga menekankan bahwa hubungan yang terbentuk antara Fiji dengan Tiongkok didasari atas nilai *win-win development*, dimana hubungan tersebut harus mampu menguntungkan kedua pihak. Oleh sebab itu, hubungan yang terbentuk tidak berarti hanya akan menguntungkan pihak Fiji saja atau Tiongkok saja, melainkan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang dimaksud lebih berfokus kepada aspek perekonomian, dimana hubungan ini ditujukan untuk saling memajukan perekonomian kedua pihak. Meski begitu, bukan berarti hubungan ini

hanya berfokus kepada aspek ekonomi saja, karena aspek lain seperti aspek politik juga diperhatikan oleh kedua negara.

Melihat dari segi kepentingan, dapat dikatakan bahwa Fiji mampu menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan lebih banyak. Keuntungan yang didapat oleh Fiji, khususnya dalam aspek ekonomi dapat dilihat dari berbagai proyek yang dijalankan oleh Tiongkok. Proyek-proyek yang dijalankan Tiongkok pada nyatanya mampu menunjang keberlangsungan perekonomian Fiji yang pada saat itu membutuhkan bantuan setelah Australia tidak lagi memberikan bantuan. Bentuk proyek yang dijalankan oleh Tiongkok dapat terlihat pada proyek jembatan Stinson Parade dan jembatan Vatuwaga yang kemudian juga dikenal dengan "Bridges of Brotherhood". Dengan adanya kedua jembatan tersebut, perekonomian Fiji menjadi terbantu karena akses transportasi menjadi lebih mudah (Losirene 2018). Lyu Guixia (2015, 7) juga menyampaikan bahwa Tiongkok juga menjalankan proyek-proyek berupa peningkatan sektor layanan masyarakat dengan memperbaiki gedung-gedung pemerintahan dan menambah beberapa penunjang, seperti perlengkapan komputer dan lainnya. Tidak hanya sebatas bantuan material, Tiongkok juga tidak segan untuk memberikan bantuan berupa pelatihan kepada para tenaga kerja yang berada di Fiji. Awalnya, Tiongkok hanya memberikan pelatihan dalam bidang teknologi agrikultur, namun bantuan pelatihan ini terus berkembang hingga meliputi aspek-aspek lain seperti industri, transportasi, pegawai swasta, dan bidang-bidang lainnya (Guixia 2015, 11). Lacanivalu Losirene (2018) melalui tulisannya menambahkan bahwa dengan adanya bantuan-bantuan tersebut, para tenaga kerja di Fiji akhirnya mampu mendapatkan ilmu serta ketrampilan yang baru yang belum pernah diketahui sebelumnya.

Keuntungan yang didapat oleh Fiji tidak berhenti pada aspek ekonomi saja, dimana Fiji juga cukup diuntungkan dalam aspek politik. Meski keuntungan politik ini tidak begitu terlihat, namun memiliki pengaruh yang besar bagi Fiji. Keuntungan ini tidak lain adalah dukungan Tiongkok terhadap keputusan Fiji yang tetap menjalankan rezim militernya tanpa melangsungkan pemilu terlebih dahulu. Hal ini tidak lain disebabkan oleh nilai *non-interference* yang dijalankan oleh Tiongkok sehingga bantuan yang diberikan oleh Tiongkok kepada Fiji terus berlangsung (Guixia 2015, 3). Tanpa disadari, dukungan ini begitu bernilai bagi Fiji, bahkan dapat menjadi dukungan yang bersifat jangka panjang. Melihat dari segi sejarah, kudeta bukanlah suatu hal yang baru bagi Fiji. Kudeta pernah berlangsung di Fiji pada tahun 1987 dan 2000 sebelum berlangsung kembali pada tahun 2006. Sandra Tarte (2009, 409) kemudian menggambarkan kondisi di Fiji ini sebagai suatu "Coup Culture", dimana kudeta seakan sudah menjadi budaya di Fiji setiap kali ada permasalahan di dalam pemerintahannya. Adanya kudeta yang berulang tersebut seakan mewujudkan pemikiran di dalam pemerintahan maupun masyarakat Fiji bahwa kudeta menjadi solusi yang solutif dan efektif apabila terjadi permasalahan dalam diri pemerintahan Fiji, meskipun pada nyatanya praktik kudeta tidak sepenuhnya bernilai baik. Apalagi, kuatnya pengaruh militer akan cenderung membuat praktik kudeta semakin mudah berlangsung (Tarte 2009, 414). Oleh sebab itu, adanya aliansi dengan Tiongkok yang menerapkan nilai *non-interference* membuat Fiji tidak akan kehilangan aliansinya pada masa yang akan datang apabila pada masa yang akan datang akan berlangsung kudeta lagi di Fiji.

Meskipun terlihat lebih berkecukupan, Tiongkok juga mampu memaksimalkan hubungan ini sehingga Tiongkok juga mendapatkan beberapa keuntungan. Terlebih lagi, karena didasari atas nilai *win-win development*, tidak salah apabila Tiongkok juga mencoba untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk keuntungan yang didapat oleh Tiongkok dapat terlihat pada sektor perekonomian. Keuntungan ekonomi yang didapat oleh Tiongkok didasari atas posisi Fiji yang menjadi salah satu pusat jalur perdagangan internasional, baik udara maupun laur. Oleh sebab itu, Tiongkok dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk memperkenalkan hingga mempromosikan produk-produk yang dimilikinya. Tidak hanya melalui penjualan barang, Tiongkok juga mampu mendapatkan keuntungan melalui investasi yang dilakukan, baik oleh pemerintah Tiongkok maupun perusahaan Tiongkok (Yang 2011, 311). Kemudian, Lyu Guixia juga menambahkan bahwa Tiongkok mampu mendapatkan keuntungan dalam hal

ketenagakerjaan, dimana Tiongkok mengalami permasalahan kelebihan tenaga kerja. Masalah ini cukup mampu teratasi dengan mengirimkan tenaga kerja tersebut ke Fiji. Secara tidak langsung hal ini juga menguntungkan perekonomian Tiongkok, seperti melalui adanya pemberian *remittance*. Terlepas dari itu, Tiongkok juga mampu mendapatkan akses kepada produk-produk laut yang dimiliki oleh Fiji. Tiongkok mampu mendapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya dan apabila Tiongkok mampu memaksimalkannya, maka keuntungan yang didapat juga akan lebih banyak (Veramu 2016).

Selain keuntungan ekonomi, Tiongkok juga mampu mendapatkan keuntungan dari segi politik. Keuntungan politik yang dimaksud dalam kaitan hubungan Fiji dengan Tiongkok tidak lain adalah posisi Taiwan di Fiji, yang mana Tiongkok dan Taiwan merupakan dua negara yang sedang bersaing dalam hal pengakuan di dunia internasional. Perlu diketahui bahwa Taiwan pada dasarnya terlebih dahulu menjalin hubungan dengan Fiji dibandingkan Tiongkok, yaitu pada tahun 1971 sedangkan Tiongkok mulai berhubungan dengan Fiji pada tahun 1975 (Yang 2011, 312). Keberadaan Taiwan di Fiji dianggap oleh Tiongkok sebagai suatu ancaman tersendiri bagi Tiongkok sehingga Tiongkok beberapa kali menekan Fiji untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Taiwan. Di lain pihak, Fiji pada awalnya tidak begitu memperhatikan permasalahan antara kedua pihak. Bahkan, Fiji menerima kedua negara tanpa mengutamakan salah satu pihak. Meski begitu, Tiongkok tetap berupaya untuk menghilangkan pengaruh Taiwan di Fiji karena Tiongkok ingin mengurangi jumlah negara yang mengakui keberadaan Taiwan. Tahun 2006 sendiri, ketika berlangsungnya kudeta di Fiji menjadi momen yang tepat bagi Tiongkok karena pada momen tersebut, Taiwan sudah tidak terlalu tertarik lagi untuk menjalin hubungan dengan Fiji. Dengan menurunnya pengaruh Taiwan, Tiongkok memanfaatkan hal tersebut untuk semakin menguatkan pengaruhnya yang mampu membuat Fiji ikut mendukung kebijakan “One-China Policy” milik Tiongkok (Guixia 2015, 11-12).

Implikasi Hubungan Fiji-Tiongkok Terhadap Dinamika Kawasan Pasifik Selatan

Hubungan yang terbentuk antara Fiji dengan Tiongkok pada nyatanya tidak hanya berdampak kepada kedua belah pihak. Hubungan antara kedua pihak mampu berdampak kepada dinamika di dalam kawasan Pasifik Selatan. Pada dasarnya, kawasan Pasifik Selatan merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh Australia secara cukup besar ditambah dengan pengaruh Selandia Baru yang berada di bawah Australia. Namun, kudeta di Fiji pada tahun 2006 yang membuat Fiji memiliki hubungan yang semakin erat dengan Tiongkok pada nyatanya mampu menjadikan Fiji sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan. Keberadaan pengaruh Tiongkok bagi Fiji setelah ditinggalkan oleh Australia dan Selandia Baru mampu membuat Fiji mengubah perilakunya di kawasan Pasifik Selatan. Pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF yang pada awalnya bertujuan untuk menekan Fiji justru mampu meningkatkan perasaan *independence* atau kebebasan serta *confidence* atau kepercayaan diri Fiji yang membuat Fiji berani untuk melakukan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Berawal dari pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF, Fiji justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas ruang gerakannya. Michael O’Keefe (2015, 130) melalui tulisannya menyampaikan bahwa hukuman tersebut justru membuat Fiji dapat bebas melakukan apapun. Hal ini dikarenakan Fiji tidak lagi terlalu dibatasi oleh keberadaan Australia, dimana sebelumnya segala hal yang dilakukan oleh Fiji masih diawasi oleh Australia melalui PIF. Selain itu, hal ini juga mengartikan bahwa Fiji menjadi lebih bebas bermanuver dalam hal menjalin hubungan dengan negara lainnya, seperti dengan Tiongkok (Stewart 2014). Berawal dari hubungan yang terbentuk dengan Tiongkok, akhirnya muncul rasa kepercayaan diri dari Fiji bahwa Fiji mampu untuk tetap mempertahankan eksistensinya meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Berawal dari rasa percaya diri tersebut, Fiji juga merasa lebih bebas dibandingkan sebelumnya sehingga Fiji juga berupaya untuk dapat mengurangi atau bahkan terlepas dari ketergantungannya kepada Australia, Selandia Baru, maupun PIF (Stewart 2016, 240). Tumbuhnya perasaan percaya diri dan kebebasan tersebut seakan

menjadikan Fiji sebagai salah satu “pemain regional baru” di kawasan Pasifik Selatan. Untuk mencapai hal tersebut, Michael O’Keefe (2015, 130) melalui tulisannya menjelaskan bahwa faktor kekuatan dan keinginan yang dimiliki oleh Fiji menjadi faktor penting yang mampu membuat Fiji menjadi seperti demikian.

Selain dari diri Fiji sendiri, kemunculan rasa percaya diri serta kebebasan dari Fiji juga dipengaruhi oleh keberadaan Tiongkok. Michael O’Keefe (2011) melalui tulisannya menyampaikan bahwa kehadiran Tiongkok yang saat ini menjadi aliansi utama Fiji mampu meyakinkan serta mendukung segala keputusan Fiji yang berkaitan dengan peran barunya di kawasan. Bahkan, Tiongkok meyakinkan bahwa Fiji tidak perlu lagi menghiraukan adanya intervensi-intervensi dari pihak lain. Hal ini pula yang menjadi dasar dari implementasi kebijakan *Look North Policy* yang membuat Fiji berani untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di bagian utara, atau lebih tepatnya di kawasan Asia. Berawal dari hubungan dengan Tiongkok, Fiji kemudian berani untuk menjalin hubungan dengan Indonesia, Rusia, hingga India. Bahkan, Fiji berani untuk mencoba meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah (O’Keefe 2015, 130). Hal tersebut tentu tidak akan dilakukan oleh Fiji apabila Fiji tidak memiliki rasa percaya diri serta kebebasan yang didapat pasca pembekuan keanggotaannya dalam PIF. Alex Stewart (2016, 240) melalui tulisannya menambahkan bahwa Fiji memang terhitung negara yang kecil apabila dibandingkan dengan Australia, Selandia Baru, ataupun Papua Nugini. Namun, Fiji terhitung sebagai negara yang cukup besar dibandingkan dengan mayoritas negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Fiji juga terhitung lebih “canggih” serta lebih pintar dibandingkan mayoritas negara Pasifik Selatan lainnya sehingga Fiji mampu memiliki inisiatif tersebut. Bahkan, apabila dibandingkan dengan Papua Nugini yang dapat dikatakan memiliki tingkat pengaruh yang sama dengan Fiji, Papua Nugini belum mampu untuk berperilaku seperti Fiji karena masih memiliki ketergantungan kepada Australia.

Rasa percaya diri yang didapat oleh Fiji kemudian diimplementasikan menjadi suatu keputusan yang cukup kontroversial, yaitu melakukan kritik terhadap PIF, yang mana PIF merupakan organisasi regional inti di kawasan Pasifik Selatan. Fiji memandang bahwa keberlangsungan dari PIF masih belum dapat berjalan efektif karena Fiji memandang PIF hanya dijadikan sebagai alat dominasi Australia dan Selandia Baru terhadap negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan (Stewart 2016, 232). Suara negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan cenderung jarang diperhatikan sehingga keberadaan mereka seakan kurang diperhatikan. Berawal dari kritik tersebut, Fiji kemudian mengeluarkan tuntutan agar Australia dan Selandia Baru dikeluarkan dari keanggotaan PIF (Cooney 2014). Tuntutan ini didasari atas kritik bahwa Australia dan Selandia Baru belum menjalankan perannya sesuai dengan semestinya. Seharusnya, Australia dan Selandia Baru berperan sebagai *development partners*, bukan justru memanfaatkan negara-negara kecil di kawasan untuk kepentingan pribadi (Fox 2015). Australia dan Selandia Baru hanya sebatas memberikan bantuan luar negeri tanpa ikut mengembangkan negara-negara tersebut. Bahkan, Frank Bainimarama (dalam Callick 2015) mengumpamakan bahwa keberadaan Australia dan Selandia Baru dalam PIF seperti negara-negara industri yang mengutamakan kesejahteraan suatu industri pengasil karbon serta pekerjaannya dibandingkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup negara Pasifik Selatan lainnya. Bahkan, tidak jarang Australia justru dinilai merugikan beberapa pihak yang lain, seperti melakukan pencemaran lingkungan terbanyak dibandingkan negara-negara Pasifik Selatan lainnya (Fox 2015).

Sebagai kelanjutan dari kritik yang diberikan oleh Fiji terhadap PIF, Fiji juga mencoba untuk menunjukkan kepada negara-negara Pasifik Selatan lainnya khususnya bahwa Fiji mampu mewujudkan peran yang lebih memperhatikan kepentingan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan peran Fiji melalui organisasi regional lain selain PIF. Salah satu organisasi tersebut adalah *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Berdasarkan tulisan Sandra Tarte (2014, 319), MSG memang bukanlah suatu organisasi baru di kawasan Pasifik Selatan karena sudah aktif beroperasi sejak tahun 1983 ketika negara-negara Melanesia mencoba membuat forum yang dapat menyatukan suara negara-negara

Melanesia agar lebih diperhatikan di forum yang lebih besar. Peningkatan peran Fiji melalui MSG sendiri dapat terlihat pada tahun 2010, dimana tahun 2010 merupakan pergantian kursi kepemimpinan MSG dari Vanuatu menjadi Fiji. Momen tersebut sendiri bertepatan dengan peningkatan rasa percaya diri dan kebebasan yang di dapat Fiji setelah keanggotaannya dalam PIF dibekukan dan mendapatkan dukungan dari Tiongkok. Oleh sebab itu, Fiji mencoba untuk meneruskan perilakunya yang telah Fiji lakukan di MSG, seperti menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang sebelumnya tidak pernah diterapkan seperti pembentukan *Melanesian Green Climate Fund* serta membentuk liberalisasi perdagangan antar negara anggota (Carter dan Firth 2015, 21). Tiongkok yang juga berada di belakang Fiji turut mendukung kebijakan yang diterapkan Fiji dengan memberikan bantuan dana untuk melancarkan segala kegiatan MSG (May 2011, 1-2). Atas hal ini, akhirnya Fiji mampu mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota MSG lainnya dan tidak lagi sepenuhnya memojokkan Fiji seperti yang dilakukan oleh Australia maupun Selandia Baru.

Selain melalui MSG, Fiji juga mencoba meningkatkan perannya di kawasan melalui organisasi lain, yaitu *Pacific Islands Development Forum* (PIDF). Berbeda dengan MSG, PIDF baru dibentuk setelah Fiji mengalami peningkatan peran pasca pembekuan keanggotaannya dalam PIF. Setelah diresmikan pada tahun 2013, Fiji sebagai inisiator dan penggerak dari PIDF mencoba untuk melayani kepentingan negara-negara kecil lainnya di kawasan Pasifik Selatan. Latar belakang Fiji ingin membentuk PIDF tidak lain adalah argumen Fiji yang memandan bahwa PIF yang dimotori oleh Australia dan Selandia Baru cenderung kurang memperhatikan kepentingan negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan dan lebih menguntungkan Australia dan Selandia Baru secara sepihak. Oleh sebab itu, Fiji bersama dengan PIDF mencoba untuk lebih mewakili kawasan Pasifik Selatan dibandingkan PIF (Cooney 2014). Alex Stewart (2016, 234) melalui tulisannya menyampaikan bahwa Fiji melalui PIDF mencoba mengakomodasi segala kepentingan negara-negara Pasifik Selatan yang kurang diperhatikan PIF, seperti melalui implementasi kebijakan akomodasi agenda negara-negara Pasifik Selatan terkait pembangunan berkelanjutan dan menyatukan agenda seluruh negara Pasifik Selatan dalam *UN Asia-Pacific Group*. Jenny Hayward-Jones (2013 dalam Stewart 2016, 236) juga menyampaikan bahwa PIDF mampu berperan sebagai kelompok diskusi yang menjadi kelanjutan dari diskusi yang berada dalam tingkat PIF. Apabila dikaitkan dengan Tiongkok, peran Tiongkok dalam PIDF tidak jauh berbeda dengan peran Tiongkok dalam MSG, dimana Tiongkok mendukung segala keputusan Fiji dalam PIDF melalui pemberian bantuan luar negeri (Callick 2015).

Kesimpulan

Kudeta yang berlangsung di Fiji pada tahun 2006 telah membawa Fiji menuju kepada periode yang baru dalam sejarah Fiji. Meskipun bukan kudeta yang pertama, namun kudeta yang berlangsung pada tahun 2006 dapat dikatakan berbeda karena berdampak kepada pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF. Pembekuan tersebut terjadi karena Frank Bainimarama yang menjadi kepala pemerintahan Fiji saat itu enggan untuk melangsungkan pemilu yang demokratis dan terus menjalankan rezim militernya. Meski telah ditekan, namun Fiji tetap tidak segera melakukan pemilu. Bahkan, Fiji memutuskan untuk mencari negara besar lain yang mampu menjadi rekan aliansi yang dapat memberikan bantuan luar negeri bagi Fiji setelah Australia dan Selandia Baru tidak lagi memberikan bantuan luar negeri ke Fiji. Tiongkok menjadi negara yang mampu mengisi kekosongan tersebut dan Tiongkok sendiri menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Fiji. Berdasar pada prinsip *strategic partnership*, Fiji dan Tiongkok telah menjalin hubungan yang mampu menguntungkan kedua belah pihak tanpa mengutamakan salah satu pihak. Tanpa disadari, hubungan yang terbentuk mampu membuat Fiji seakan memiliki peran baru di kawasan, dimana Fiji menjadi memiliki rasa percaya diri serta kebebasan yang membuat Fiji tidak lagi terikat oleh Australia. Hal ini dilakukan oleh Fiji melalui dua organisasi lain selain PIF, yaitu PIDF dan MSG. Dengan adanya perubahan perilaku tersebut, Fiji mampu menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk dengan Tiongkok mampu membuat Fiji tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap Australia seperti sebelumnya.

Referensi:

- Alley, Roderic, 2001. "Fiji's Coups of 1987 and 2000: A Comparison", dalam *RJP*, Hal. 217-234.
- Callick, Rowan, 2015. *Fiji's Bainimarama Blasts Australia's 'Coalition of the Selfish'* [Online]. Tersedia dalam <https://www.theaustralian.com.au/news/world/fijis-bainimarama-blasts-australias-coalition-of-the-selfish/news-story/a49a7be2d33585cea3bb48174a006424> . [Diakses pada 15 April 2018].
- Carter, George, dan Stewart Firth, 2015. "The Mood in Melanesia After The Refional Assistance Mission to Solomon Islands", dalam *Asia & The Pacific Policy Studies*, Vol. 3, No. 1, hal. 16-25
- Chinese Embassy, *Fiji and China Relations* [Online]. Tersedia dalam <http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=387110>. [Diakses pada 22 Februari 2018].
- Cooney, Campbell, 2014. *Fiji Shuns Pacific Forum Membership Unless Australia and New Zealand are Expelled* [Online]. Tersedia dalam <http://www.abc.net.au/news/2014-04-29/fiji-shuns-forum-membership/5418014>. [Diakses pada 13 April 2018].
- Czechowska, Lucyna, 2013. "The Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern Alliance Theory", dalam *The Copernicus Journal of Political Studies*, No. 2 (4).
- Dwivedi, Sangit Sarita, 2012. "Alliances in International Relations Theory", dalam *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, Vol. 1, Issue 8.
- Fonseca, Pedro Cezar Dutra, 2016. "The Concept of Emerging Power in International Politics and Economy", dalam *Brazilian Journal of Political Economy*, Vol. 36, No. 1 (142), Hal. 46-69.
- Fox, Liam, 2015. *Fiji PM Frank Bainimarama to Shun Pacific Island Forum over 'Undue Influence' of Australia, NZ* [Online]. Tersedia dalam <http://www.abc.net.au/news/2015-05-06/fiji-prime-minister-frank-bainimarama-slams-australia2c-new-ze/6449514>. [Diakses pada 13 April 2018].
- Gaglioti, Frank, 2009. *Australia Threatens Fiji with Suspension from Pacific Islands Forum* [Online]. Tersedia dalam <https://www.wsws.org/en/articles/2009/02/spif-fo2.html>. [Diakses pada 20 Agustus 2017].
- Gajauskaite, Ieva, 2013. "Strategic Partnerships in Foreign Policy: Comparative Analysis of Polish – Ukrainian and Lithuanian – Ukrainian Strategic Partnerships", dalam *Lithuanian Annual Strategic Review*, Vol. 11, Issue 1.
- Guixia, Lyu, 2015. "China's Development Aid to Fiji: Motive and Method", dalam *The Research Centre of the Pacific Island Countries*. Liaocheng University.
- Hasenkamp, Oliver, 2014. *Fiji's Suspension from the Pacific Islands Forum*. Tesis Magister. Berlin: Otto-Suhr-Institute for Political Science of the Freie Universität Berlin.
- Ian, Chong Ja, 2003. "Revisiting Responses to Power Preponderance: Going Beyond The Balancing-Bandwagoning Dichotomy", dalam *IDSS Working Paper*, No. 54.
- Komai, Makareta, 2015. "Fiji's Foreign Policy and the New Pacific Diplomcy", dalam Fry, Greg, dan Sandra Tarte (eds.). *The New Pacific Diplomacy*. Canberra: ANU Press.
- Kun, Li, 2015. *Why Does China Value Fiji Look North Policy* [Online]. Tersedia dalam <http://english.cntv.cn/2015/07/17/ARTI1437116047087342.shtml>. [Diakses pada 24 Januari 2018].
- Lal, Brij V., 2009. "'This Process of Political Readjustment': The Aftermath of the 2006 Fiji Coup", dalam Fraenkel, Jon et al. (eds.), 2009. *The 2006 Military in Fiji: A Coup to End All Coups?*. Canberra: ANU E Press.

- Losirene, Lacanivalu, 2018. *Fijian Worker Acknowledged by Chinese Govt* [Online]. Tersedia dalam <http://fijisun.com.fj/2018/01/12/fijian-workers-acknowledged-by-chinese-govt/>. [Diakses pada 10 Maret 2018].
- Lowy Institute for International Policy, 2015. *China Aid in The Pacific* [Online]. Tersedia dalam <https://chineseaidmap.lowyinstitute.org>. [Diakses pada 18 Februari 2018].
- Mawi, Litia, 2015. "Fiji's Emerging Brand of Pacific Diplomacy: A Fiji Government Perspective", dalam Fry, Greg, dan Sandra Tarte (eds.). *The New Pacific Diplomacy*. Canberra: ANU Press.
- May, Ronald, 2011. "The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity", dalam *Policy Analysis*, No. 74. Australian Strategic Policy Institute.
- Niou, Emerson M. S., dan Peter C Ordeshook, 1994. "Alliances in Anarchic International Systems", dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 38, No. 2, hal. 167-191.
- Nolte, Detlef, 2007. "How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics", dalam *ECPR Joint Session of Workshops*. GIGA German Institute of Global and Area Studies.
- O'Keefe, Michael, 2011. *Fiji Has Moved On and Australia Must Play by The New Rules* [Online]. Tersedia dalam <https://www.theaustralian.com.au/news/world/fiji-has-moved-on-and-australia-must-play-by-the-new-rules/news-story/2ac9ef8bbbada2462d093cd1b5bac703?sv=651de222a23f7b7cf88d43d25eb185f2>. [Diakses pada 11 April 2018].
- O'Keefe, Michael, 2015. "The Strategic Context of the New Pacific Diplomacy", dalam Fry, Greg, dan Sandra Tarte (eds.). *The New Pacific Diplomacy*. Canberra: ANU Press.
- Peebles, Dave, 2005. "The Pacific Islands Forum", dalam *Pacific Regional Order*. Canberra: ANU-E Press.
- Rukma, Dany, dan Saiman Pakpahan, 2015. "Intervensi Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer", dalam *Jurnal Transnasional*, Vol. 7, No. 1.
- Stephen, Matthew D., 2012. "Rising Regional Powers and International Institutions: The Foreign Policy Orientations of India, Brazil and South Africa", dalam *Global Society*, Vol. 26, No. 3, Hal. 289-309.
- Stewart, Alex, 2014. *How Fiji Outsmarted Australia* [Online]. Tersedia dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/how-fiji-outsmarted-australia>. [Diakses pada 13 April 2018].
- Stewart, Alex, 2016. "Fiji's Evolving Foreign Policy and Pacific Multilateral Order: Pre- and Post-Election", dalam Ratuva, Steven, dan Stephanie Lawson (eds.), 2016. *The People Have Spoken: The 2014 Elections in Fiji*. Canberra: ANU Press
- Tank, Pinar, 2012. "The Concept of 'Rising Powers'", dalam *NOREF Policy Brief*. Norwegian Peacebuilding Resource Centre.
- Tarte, Sandra, 2009. "Reflections in Fiji's 'Coup Culture'", dalam Fraenkel, Jon et al. (eds.), 2009. *The 2006 Military in Fiji: A Coup to End All Coups?*. Canberra: ANU E Press.
- Tarte, Sandra, 2014. "Regionalism and Changing Regional Order in The Pacific Islands", dalam *Asia & The Pacific Policy Studies*, Vol. 1, No. 2, hal. 312-324.
- Thomas, Nicholas, 1990. "Regional Politics, Ethnicity, and Customs in Fiji", dalam *The Contemporary Pacific*, Volume 2, Number 1, Hal. 131-146.
- Veramu, Joseph, 2016. *Fiji and China's Economic Pathways* [Online]. Tersedia dalam <http://fijisun.com.fj/2016/01/03/fiji-and-chinas-economic-pathways/>. [Diakses pada 22 Februari 2018].

- Wardhani, Baiq et al., 2018. "On The Digital Divide: Role of The University of The South Pacific in Enhancing Education in The Pacific Countries", dalam *World Transactions on Engineering and Technology Education*, Vol. 16, No.1.
- Yang, Jian, 2009. "China and South Pacific Regionalism: The Rising Power as a Cautious Newcomer", dalam Kavalski, Emilian (ed.). *China and the Global Politics of Regionalization*. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
- Yang, Jian, 2011. "China in Fiji: Displacing Traditional Players?", dalam *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 65, No. 3, hal. 305-321
- Zhang, Jian, 2015. "China's Role in the Pacific Island Region", dalam Azizian, Rouben, dan Carleton Cramer (eds.). *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania*. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.